

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM UPAYA Mendukung PENGENDALIAN KREDIT (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan)

Ratna Bintari
Mochammad Dzulkirom
Achmad Husaini
Fakultas Ilmu Administrasi

ABSTRAK

Pengendalian kredit merupakan bagian dari pengendalian intern yang bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo serta untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja tersebut telah mendukung pengendalian kredit atau belum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo dengan melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang ada pada pengendalian kredit. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan belum memenuhi pengendalian kredit yang baik, sebab belum adanya fungsi Internal Audit, belum terdapat Customer Service serta belum terdapat fungsi Kasir pada tiap Kantor Kas sehingga menyebabkan perangkapan tugas Account Officer yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan.

Kata kunci : Kredit, Modal Kerja, Pengendalian Kredit

ABSTRACT

Credit control is part of internal control that aims to maintain the loans remain work well, productive and continued. The objective of this study was to determine the capital lending system and procedures adopted by the Koperasi Bank Perkreditan Rakyat of Ngadirojo as well as to identify whether the capital lending systems and procedures have been supporting the credit control or not. Types of research used in this study was a descriptive study with a qualitative approach. The focus of this research is the capital lending system and procedures in Koperasi Bank Perkreditan Rakyat of Ngadirojo by analyzing the aspects existing in the credit control. According to analysis of the data obtained from the Koperasi Bank Perkreditan Rakyat of Ngadirojo, the researcher found that the systems and procedures adopted have not met a good standard of credit control, because the absence of the Internal Audit function, Customer Service, and Cashier function was not found in every Treasury Office so that it result in multiple duties of account Officer that allow an authority abuse or misconduct.

Keyword: Credit, Capital Lending, Credit Control

1. PENDAHULUAN

Bank berperan untuk memberikan bantuan dana (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian kredit ini mempunyai beberapa manfaat baik untuk Bank, pemerintah maupun bagi nasabah. Manfaat kredit bagi Bank utamanya yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, hal ini penting untuk kelangsungan hidup Bank. Bagi nasabah manfaat yang diperoleh adalah pemberian kredit

dapat membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik yang berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah penerimaan pajak yang berasal dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Terbukanya lapangan kerja artinya dalam pembangunan usaha

baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur, dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara serta dapat meningkatkan devisa negara.

Pengendalian kredit merupakan bagian dari pengendalian intern yang bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pengendalian kredit penting, sebab jika terjadi kredit macet berarti bagi bank bersangkutan akan menderitakerugian, oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian kredit yang baik dan benar.

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap yang bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loans* (NPL). *Non Performing Loans* (NPL) tinggi akan mengakibatkan terganggunya kesehatan bank yang bersangkutan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dinilai akan menurunkan kredit bermasalah, sehingga dalam memberikan kredit, harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang struktur modalnya berasal dari Koperasi. Sama halnya dengan bank lainnya, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo juga memiliki fungsi melayani masyarakat melalui kredit, deposito maupun tabungan. Sistem pemberian kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo meliputi tahap permohonan kredit, wawancara, *survey*, analisa kredit, putusan kredit, pencairan kredit, administasi kredit dan pengawasan kredit.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo tentunya mempunyai resiko. Resiko tersebut umumnya berupa kredit macet. Besarnya kredit bermasalah, dapat ditunjukkan dengan tingkat *Non Performing Loans* (NPL). Meskipun kredit bermasalah tidak dapat dihindari, tetapi pihak bank harus meminimalkannya agar tidak melebihi standar kesehatan Bank yang ditetapkan yaitu 5%.

Tingkat *Non Performing Loans* (NPL) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo pada periode 2010-2012 mengalami kenaikan sebesar dari 5,69% menjadi 7,59% dengan kenaikan sebesar 1,9% dan mengalami penurunan dari 7,59% menjadi 6,18% dengan penurunan sebesar 1,41%. Meskipun *Non Performing Loans* (NPL) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo telah mengalami penurunan sebesar 1,14%, namun masih berada di atas batas *Non Performing Loans* (NPL) yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu 5%. Besarnya tingkat *Non Performing Loans* (NPL) umumnya dipengaruhi oleh faktor intern bank, faktor intern debitur dan faktor eksternal bank maupun debitur. Faktor intern bank dapat berupa analisis yang tidak sesuai dengan 5C atau bank tidak melakukan pengawasan secara teratur. Faktor intern debitur dapat berupa penyalahgunaan kredit atau debitur yang nakal/mempunyai karakter buruk, sedangkan faktor eksternal bank dan debitur dapat berupa bencana alam yang menyebabkan usaha debitur mengalami kerugian sehingga tidak mampu melunasi kreditnya atau berasal dari laporan keuangan dari akuntan publik yang tidak benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo dan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja tersebut telah mendukung pengendalian kredit atau belum.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur merupakan hal yang saling berhubungan. Adanya suatu sistem selalu didampingi dengan prosedur, sebaliknya prosedur tidak mampu berdiri sendiri tanpa berlandaskan sebuah sistem. Sebagai contoh, formulir adalah salah satu dari unsur sistem akuntansi yang merupakan *output* dari sistem lain dan menjadi *input* dari sistem akuntansi. Sistem lain yang menghasilkan formulir sebagai *output* terdiri dari bagian-bagian yang akhirnya disebut dengan prosedur.

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi” W. Gerald Cole dalam Baridwan (2002:3).

“Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu” Steven A. Moscovice dalam Baridwan (2002:3). Pendapat lain mengenai sistem dan prosedur dijelaskan sebagai berikut, “sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang” (Mulyadi, 2001:5).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada dasarnya sistem terdiri dari jaringan prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan mempunyai pola tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan. Prosedur adalah urutan klerikal yang dibuat untuk menyeragamkan penanganan transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

2.2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Selain itu kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah.

“Modal kerja menunjukkan sejumlah dana yang tertanam pada aktiva lancar yang akan dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas perusahaan”. “Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit bagi usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,00 dan usaha menengah dengan plafon kredit di atas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5000.000.000,00”. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:253)

Konsep modal kerja mencakup 3 hal yaitu modal kerja (*working capital assets*), modal kerja brutto (*gross working capital*) dan modal kerja netto (*net working capital*).

- a. Modal kerja (*working capital assets*)
Modal kerja (*working capital assets*) adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga dapat beroperasi secara normal dan lancar.
- b. Modal kerja brutto (*gross working capital*)
Modal kerja brutto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*) dan didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar.
- c. Modal kerja netto (*net working capital*)
Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dalam konsep ini sejumlah aktiva lancar tertentu harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain.

Besarnya modal kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tingkat aktivitas penjualan dan perputaran modal kerja. Jumlah kredit modal kerja yang akan disalurkan oleh bank kepada debitur harus ditentukan sebelumnya sehingga jumlah yang dibutuhkan debitur sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah kredit yang dibutuhkan oleh debitur diantaranya adalah:

- a. Pertumbuhan penjualan, dikalikan dengan cara membuat proyeksi penjualan yang akan datang berdasarkan pencapaian pada periode sebelumnya.
- b. Perputaran piutang (ITO), dihitung dengan cara membagi piutang dagang dengan penjualan dan dikalikan dengan jumlah hari selama periode kegiatan tersebut berlangsung sehingga diperoleh jumlah hari perputaran piutang dagang.
- c. Perputaran persediaan (RTO), dihitung dari pembagian antara persediaan dagang dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan dikalikan dengan jumlah hari selama kegiatan tersebut berlangsung sehingga dapat diperoleh jumlah hari perputaran persediaan barang.
- d. Perputaran hutang (DTO), jumlah hari perputaran pengambalian piutang dapat diketahui dengan cara membagi hutang dagang Harga Pokok Penjualan (HPP) dan dikalikan dengan jumlah hari selama kegiatan tersebut berlangsung.
- e. Kas yang tersedia pada periode sebelumnya (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:253).

2.3. Pengendalian Kredit

Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, tentunya akan menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan perkreditannya, misalnya kredit macet. Masalah kredit macet yang dihadapi oleh bank dapat dicegah dengan adanya pengendalian kredit. Peran pengendalian kredit sangat penting bagi bank, karena pengendalian kredit tersebut dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang dapat merugikan bagi bank.

“Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit agar tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pemberian kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar” (Hasibuan, 2005:105). Pendapat lain, “pengendalian intern terhadap pemberian kredit terdiri atas aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pengendalian intern kredit” (Tawaf, 1999:270).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya pengendalian kredit merupakan usaha untuk menjaga agar kredit tetap dalam kondisi lancar dengan memperhatikan aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pengendalian intern kredit.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menggambarkan suatu gejala atau objek penelitian dengan apa adanya, dengan memberikan gambaran tentang penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja dalam upaya mendukung pengendalian kredit.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo.
2. Aspek-aspek pengendalian kredit dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo yang meliputi:
 - a. Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya.
 - b. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas.
 - c. Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat.

- d. Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai.
- e. Aspek pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan.
- f. Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen.

Tahapan-tahapan analisis data dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo.
2. Menganalisis aspek-aspek dalam pengendalian kredit pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo yang meliputi:
 - a. Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya.
 - b. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas.
 - c. Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat.
 - d. Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai.
 - e. Aspek pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan.
 - f. Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo

Sistem dan prosedur dalam pemberian kredit modal kerja Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo pada dasarnya telah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, sesuai dengan teori yang telah dipelajari oleh peneliti.

4.2. Aspek-Aspek Pengendalian Kredit dalam Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo

a. Aspek Pengendalian Personel yang Kompeten dan Dapat Dipercaya

1) Pada Permohonan Kredit

Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo personel yang menerima permohonan kredit dari nasabah adalah Administrasi Kredit (ADK) yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menjelaskan syarat dan data yang harus dipenuhi / dilengkapi oleh nasabah, serta menjelaskan jenis fasilitas kredit apa yang dibutuhkan. Pada tahap permohonan

kredit, aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya telah terpenuhi.

- 2) Pada saat proses analisis kredit
Personel yang melakukan analisis pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo adalah *Account Officer* (AO) yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis data dan mempunyai pengetahuan saat mengadakan *survey on the spot* dalam proses pengumpulan data tambahan serta memberikan rekomendasi kredit secara objektif. Hal tersebut telah mencerminkan pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya.
- 3) Pada saat penarikan kredit
Pada saat penarikan kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo, Administrasi Kredit (ADK) mempunyai pengetahuan mengenai semua data dan informasi yang telah tertuang di dalam Aplikasi Permohonan Kredit (APK) yang memuat asal dana debitur, serta mempunyai kompetensi dalam hal pengikatan jaminan. Hal tersebut telah mencerminkan pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya.
- 4) Pada saat monitoring
Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo kegiatan pemantauan/ monitoring dilaksanakan oleh *Account Officer* (AO). Monitoring dilaksanakan secara berkala dan rutin untuk mengetahui penggunaan kredit oleh debitur dan *Account Officer* (AO) mempunyai hak untuk memberikan inisiatif apabila terdapat hal yang tidak wajar, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo. Kecakapan *Account Officer* (AO) dalam monitoring telah mencerminkan pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya.

b. Aspek Pengendalian adanya Pemisahan Tugas

- 1) Pada saat Permohonan Kredit
Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Administrasi Kredit (ADK) mempunyai kemampuan dan tanggung jawab dalam pengikatan jaminan nasabah sehingga telah mencerminkan pengendalian adanya pemisahan tugas.
- 2) Pada saat proses analisis kredit
Hasil analisis yang telah dilakukan oleh bagian *Account Officer* yang kemudian dinilai kembali oleh pejabat yang lebih

tinggi, yaitu Komite Kredit. Selanjutnya Komite Kredit memberikan rekomendasi kredit bahwa kredit tersebut diterima atau ditolak. Hal tersebut telah mencerminkan pengendalian adanya pemisahan tugas yang memadai.

- 3) Pada saat proses penarikan kredit
Pada dasarnya, pada Kantor Pusat Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo telah mencerminkan pengendalian adanya pemisahan tugas yang memadai, namun pada Kantor Kas belum mencerminkan pengendalian kredit yang memadai karena pada Kantor Kas Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo, belum terdapat Kasir yang bertugas melayani nasabah pada saat melakukan transaksi kredit. Tugas Kasir akhirnya digantikan oleh petugas / personel yang ada / tersedia pada Kantor Kas, seperti *Account Officer* (AO). Pada dasarnya tugas serta tanggung jawab *Account Officer* (AO) berbeda dengan Kasir, perangkapan tugas yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan, sebab bisa saja dana yang diserahkan nasabah untuk membayar tagihan kreditnya tidak dicatat.
- 4) Pada saat monitoring
Pada saat monitoring, bagian Administrasi Kredit (ADK) mempunyai peran untuk memberikan informasi tentang *collectability* debitur kepada *Account Officer* (AO). Pemantauan yang rutin dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dengan mendatangi langsung tempat usaha debitur/rumah debitur untuk membina hubungan baik dengan debitur sekaligus memantau apakah kredit tersebut digunakan sesuai dengan yang diajukan atau tidak. *Account Officer* (AO) selanjutnya akan menginformasikan keadaan / kondisi kredit nasabah kepada pejabat bagian kredit yang ada pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas telah terpenuhi.

c. Aspek Pengendalian Prosedur Otorisasi yang Tepat

- 1) Pada saat permohonan kredit
Prosedur otorisasi yang dilaksanakan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo telah sesuai dengan prinsip pengendalian kredit yang baik. Proses

permohonan kredit telah melalui proses yang telah sesuai dengan pedoman perkreditan yang dibuat oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo.

- 2) Pada saat proses analisa kredit
Pengendalian prosedur otorisasi yang tepat pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo telah terpenuhi, sebab prosedur otorisasi sudah berjalan baik yaitu hasil analisa kredit yang telah dianalisa kembali, diotorisasi oleh pejabat yang mempunyai wewenang yaitu Komite Kredit yang beranggotakan (Direktur Utama, Direktur, Kabag. Kredit dan menyertakan *Account Officer*.
- 3) Pada saat proses penarikan kredit
Pada Kantor Pusat Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo telah mencerminkan pengendalian prosedur otorisasi yang tepat. Berbeda dengan yang ada pada tiap Kantor Kas Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo karena terdapat perangkapan tugas berpengaruh juga terhadap tidak terpenuhinya pengendalian prosedur otorisasi yang tepat, sebab *Account Officer* (AO) harus merangkap tugasnya sebagai Kasir yang pada dasarnya tugas dan fungsinya berbeda dengan Kasir. Pengendalian prosedur otorisasi yang tepat belum terpenuhi pada Kantor Kas Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo.
- 4) Pada saat proses monitoring
Monitoring dilakukan oleh *Account Officer* (AO), dengan memperhatikan catatan dari Administrasi Kredit (ADK). Pengendalian prosedur otorisasi yang tepat pada saat monitoring telah terpenuhi.

d. Aspek Pengendalian Dokumen dan Catatan yang Memadai

- 1) Pada saat permohonan kredit
Dalam mengajukan permohonan kredit, nasabah mengisi formulir Aplikasi Permohonan Kredit (APK) tanpa membuat proposal, karena dengan menggunakan Aplikasi Permohonan Kredit saja telah memudahkan pihak Bank dalam memperoleh gambaran tentang kredita apa yang diinginkan oleh nasabah. Aplikasi Permohonan Kredit (APK) telah memuat kelengkapan data nasabah dan informasi pendukung lain, sehingga aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai telah terpenuhi..

- 2) Pada saat proses analisis kredit
Account Officer (AO) melakukan analisis berdasarkan Aplikasi Permohonan Kredit (APK) dan selanjutnya melakukan *survey On The Spot* (OTS), dengan cara tersebut *Account Officer* (AO) dapat mendapatkan informasi yang lengkap. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Analisa Kredit (LAK). Laporan analisis kredit (LAK) selanjutnya diserahkan kepada Komite Kredit dan dimusyawarahkan. Hal tersebut telah mencerminkan pengendalian dokumen catatan yang memadai.
- 3) Pada saat proses penarikan kredit
Sebelum melakukan pencairan kredit, telah dipersiapkan Surat Persetujuan Kredit (SPK) yang telah ditandatangani oleh nasabah. Selanjutnya dibuatkan Perjanjian Kredit (PK), nasabah diminta membawa jaminan asli untuk selanjutnya dilakukan pencairan kredit. Hal tersebut telah mencerminkan pengendalian dokumen dan catatan yang memadai.
- 4) Pada saat monitoring
Berkas-berkas kredit yang telah disimpan/diarsip oleh Administrasi Kredit (ADK), memudahkan *Account Officer* (AO) dalam memantau / memonitoring nasabah sesuai dengan berkas-berkas yang ada pada Administrasi Kredit. Aspek pengendalian dokumen dan catatan yang memadai telah terpenuhi.

e. Aspek Pengendalian Kontrol Fisik Aktiva dan Catatan

- 1) Pada saat permohonan kredit
Account Officer (AO) melakukan *Survey On The Spot* (OTS) ke tempat usaha atau tempat tinggal nasabah, dengan tujuan untuk memeriksa/mencocokkan data yang ada pada formulir Aplikasi Permohonan Kredit (APK), serta memeriksa keadaan jaminan nasabah. Pengendalian Kontrol fisik aktiva dan catatan telah terpenuhi.
- 2) Pada saat proses analisis kredit
Pengendalian kredit kontrol fisik aktiva dan catatan yang dilakukan *Account Officer* (AO) telah berjalan dengan baik. *Account Officer* (AO) telah melaksanakan pemeriksaan *On The Spot* (OTS) dan mencari data tambahan mengenai 5C debitur, kemudian menuangkan hasil analisisnya ke dalam Laporan Analisa Kredit (LAK).

- 3) Pada saat proses penarikan kredit Pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan yang terjadi pada saat penarikan kredit telah mendukung pengendalian kredit yang baik. Penarikan kredit telah disesuaikan dengan kebutuhan keuangan nasabah. Dokumen milik nasabah telah di simpan dalam tempat yang aman, yaitu dalam brankas
- 4) Pada saat monitoring Pengendalian kontrol fisik aktiva dan catatan dilaksanakan oleh *Account Officer* (AO) dengan baik, yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala pada tempat usaha nasabah (*On The Spot*). Pemantauan tersebut meliputi ricek antara laporan dari nasabah dengan keadaan di lapangan.

f. Pemeriksaan Pekerjaan Secara Independen

Secara keseluruhan aspek-aspek pengendalian kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo telah mencerminkan pengendalian kredit yang baik, namun dalam Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum mempunyai fungsi khusus untuk melakukan *Internal Audit*, hal tersebut yang menjadikan pengendalian kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo menjadi lemah.

4.3. Identifikasi Masalah

a. Belum terdapat Fungsi *Internal Audit*

Sistem internal control yang baik tidak dapat menjamin tidak adanya penyimpangan kecurangan dan pemborosan dalam suatu perusahaan, apabila orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak selalu bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Usaha untuk melaksanakan sistem pengendalian intern perkreditan yang baik adalah dilaksanakannya pemeriksaan yang teratur oleh pimpinan perusahaan dengan membentuk suatu departemen / bagian yang disebut departemen *Internal Audit*.

b. Belum terdapat bagian *Customer Service*

Customer service adalah pelayanan yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk melayani kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang bertugas untuk memberikan

informasi, dan penanganan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Selama ini pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo yang bertugas untuk memberikan informasi tentang kredit dan formulir aplikasi pengajuan kredit adalah bagian Administrasi Kredit.

c. Pada Kantor Kas belum terdapat Kasir

Fungsi Kasir salah satunya adalah menyediakan uang kas setiap hari yang dibutuhkan pada saat pencairan kredit. Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia Kasir pad Kantor Kas, sehingga tugas yang seharusnya dilakukan oleh Kasir diambil alih oleh petugas/personel yang tersedia.

4.4. Alternatif Pemecahan Masalah

a. Belum terdapat Fungsi *Internal Audit*

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, perlu dibentuk Audit Internal. Dengan adanya departemen Internal Audit, diharapkan akan dapat membantu anggota manajemen dalam berbagai hal, seperti menelaah prosedur operasi dari berbagai unit dan melaporkan hal-hal yang menyangkut tingkat kepatuhan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan, efisiensi, unit usaha atau efektifitas sistem pengawasan intern.

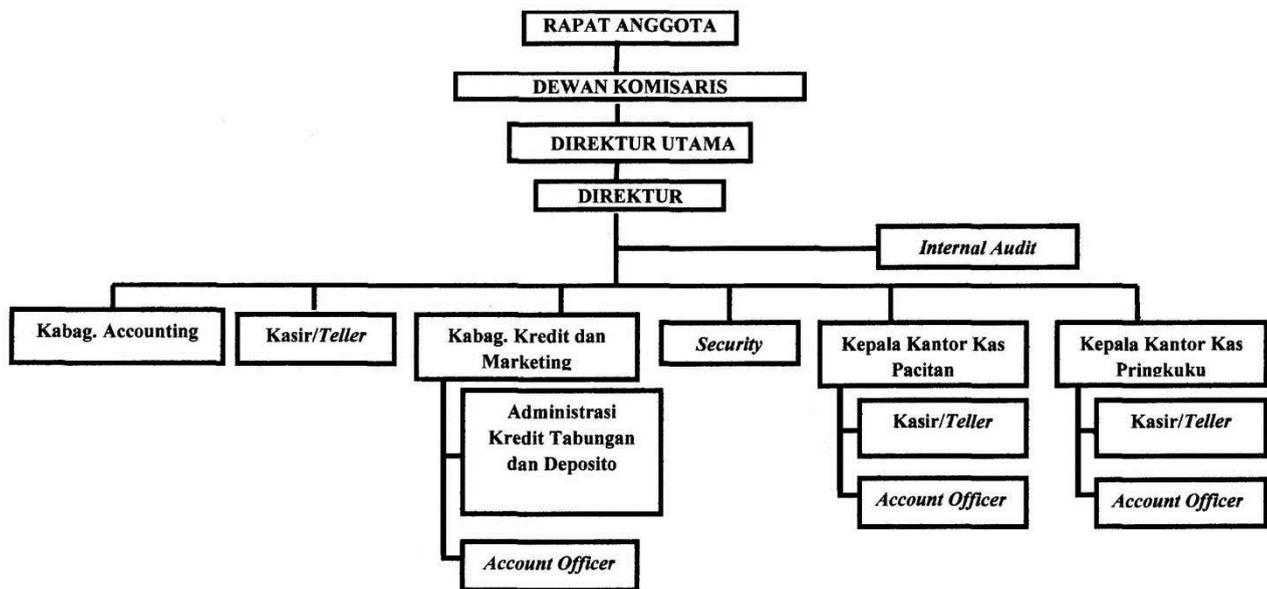
b. Belum terdapat bagian *Customer Service*

Saat ini yang bertugas memberikan informasi tentang kredit serta formulir aplikasi kredit adalah bagian Administrasi Kredit. Sebaiknya dibentuk / ditambah *Customer Service*, agar proses pengajuan kredit dapat dilaksanakan lebih cepat.

c. Pada Kantor Kas belum terdapat Kasir

Mengingat bahwa fungsi Kasir salah satunya adalah menyediakan uang kas setiap hari yang dibutuhkan pada saat pencairan kredit, maka sebaiknya fungsi tersebut segera dibentuk agar kinerja dari fungsi lainnya tidak terganggu karena harus menggantikan/mengisi kekosongan fungsi tersebut.

**Struktur Organisasi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo
Jl. Pagerejo Wiyoro Ngadirojo Kabupaten Pacitan disarankan**



Sumber : Data diolah dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo

4.5. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja yang disarankan

1. Pada tahap permohonan nasabah dapat mengajukan permohonan kredit ke bagian *Customer Service*, kemudian *Customer Service* memberikan Aplikasi Permohonan Kredit (APK) yang harus diisi oleh nasabah, kemudian didistribusikan kepada Administrasi Kredit (ADK) untuk diteliti kebenarannya.
2. Administrasi Kredit (ADK) menerima Aplikasi Permohonan Kredit (APK) dari *Customer Service*, kemudian Administrasi Kredit (ADK) meneliti kebenaran Aplikasi Permohonan Kredit (APK) yang selanjutnya diserahkan ke *Account Officer* (AO).
3. *Account Officer* (AO) Aplikasi Permohonan Kredit (APK) dari Administrasi Kredit. *Account Officer* (AO) selanjutnya melakukan wawancara dan *survey on the spot* untuk mengecek kesesuaian data dari nasabah dan melihat kondisi fisik barang jaminan. Hasil dari wawancara dan *survey on the spot* digunakan untuk pertimbangan pada tahap selanjutnya yaitu analisa kredit.
4. Pada tahap analisa kredit, *Account Officer* (AO) melakukan analisis yang dipergunakan untuk menentukan berapa

- besar kredit yang diberikan dan kemampuan serta kemauan debitur untuk mengembalikan kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga pihak bank yakin bahwa debitur mampu dan mau mengembalikan kredit tersebut tepat waktu. Analisis menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*. Hasil dari analisis kemudian dituangkan ke dalam Laporan Analisis Kredit (LAK) yang diserahkan kepada Komite Kredit bersama dengan Aplikasi Permohonan Kredit (APK).
5. Komite Kredit menerima Aplikasi Permohonan Kredit (APK) dan dari *Account Officer* (AO). Laporan Analisis Kredit (LAK) selanjutnya dimusyawarahkan oleh Komite Kredit, setelah itu diputuskan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Jika permohonan kredit ditolak maka Komite Kredit menginstruksikan Administrasi Kredit (ADK) untuk membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit, namun jika permohonan kredit disetujui maka Aplikasi Permohonan Kredit (APK) dan Laporan Analisa Kredit (LAK) diserahkan ke Administrasi Kredit (ADK) untuk diproses lebih lanjut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Fungsi *Internal Audit* pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia, sehingga pemeriksaan secara independen belum dapat terlaksana.

Customer Service pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia. Sampai saat ini, informasi tentang kredit diperoleh nasabah dari Administrasi Kredit (ADK). *Customer Service* pada dasarnya dibutuhkan untuk memberikan informasi dan melayani kebutuhan nasabah dalam mengajukan permohonan kredit, sehingga dapat mengurangi / membantu tugas yang sebelumnya ditanggung oleh Administrasi Kredit (ADK).

Kasir pada tiap Kantor Kas Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo belum tersedia. Tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir sampai saat ini masih digantikan oleh personel yang tersedia (saat ini adalah *Account Officer*), sehingga terjadi perangkapan tugas yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO). Hal tersebut tentunya akan menimbulkan masalah karena dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Penyelewengan tersebut misalnya nasabah melakukan pembayaran tagihan kredit, namun tagihan tersebut tidak dicatat. Masalah tersebut yang akhirnya juga mempengaruhi besarnya *Non Performing Loans* (NPL) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo.

5.2. Saran

Sebaiknya personel bagian *Internal Audit* yang berkompetensi segera dibentuk agar dapat membantu tugas Direksi dalam mengawasi dan mengkoordinir kegiatan operasional secara keseluruhan setiap hari. Hal tersebut akan mampu meminimalisasi terjadinya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga dapat mendukung terbentuknya pengendalian kredit yang baik.

Membentuk bagian *Customer Service*, yang bertugas untuk memberikan informasi dan melayani nasabah yang hendak mengajukan kredit. Sehingga pelayanan nasabah yang mengajukan permohonan kredit dapat dengan cepat diproses.

Secepatnya membentuk Kasir, agar kinerja dari fungsi lainnya tidak terganggu karena harus menggantikan/mengisi kekosongan fungsi tersebut serta meminimalisasi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kuncoro, Mundrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta dan Makassar: BPFE
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Tawaf, Tjukra P. 1999. *Audit Intern Bank Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang *Perbankan*. Jakarta: Asa Mandiri